

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat menggambarkan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dan dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja sektor publik. Semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan maka semakin bagus pula kinerja wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari sub sektor perkebunan memberikan nilai tambah yang meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah PDRB dan persentase kontribusi PDRB.
2. Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi, PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Sumatera Barat dan sub sektor perkebunan menjadi penyumbang kedua terbesar dalam PDRB sektor pertanian. Dapat disimpulkan bahwa daerah di Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya pertanian yang besar.

3. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, salah satu aspek fokus dan indikator kinerja kunci dalam Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PDRB sub sektor perkebunan secara nilai meningkat dari tahun 2009-2013, namun secara persentase mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pasca bencana, banyak tanaman perkebunan yang rusak sehingga perlu direhabilitasi.
4. PDRB sub sektor perkebunan memberikan kontribusi lebih dari 20 % terhadap PDRB sektor pertanian, dan kontribusi lebih dari 5 % terhadap PDRB total Sumatera Barat.
5. Sumbangan yang besar terhadap PDRB dari sub sektor perkebunan dapat diartikan kinerja yang bagus untuk sub sektor tersebut. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki kinerja yang paling bagus dalam menyumbang PDRB dari sub sektor perkebunan adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan menyumbang > 20% dari total PDRB.
6. Berdasarkan hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) didapatkan hasil bahwa ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2009-2013 yang memiliki  $LQ > 1$  dan dapat diartikan bahwa Kabupaten/Kota tersebut menjadikan sub sektor perkebunan menjadi basis perekonomian daerahnya yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya dan Sijunjung.

7. Produktivitas untuk salah satu komoditi unggulan yaitu kakao paling tinggi di Kabupaten Pasaman dan paling rendah di Kota Bukittinggi. Ada beberapa hasil yang peneliti lihat dimana produktivitas kakao di Kabupaten Padang Pariaman tidak menjadi paling tinggi padahal luas lahan yang dimiliki paling luas diantara luas lahan perkebunan di Kabupaten/ Kota lain. Dan juga terjadi di Padang Panjang, dengan luas lahan yang lebih sedikit mampu menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan Kota Bukittinggi yang memiliki lahan lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa untuk komoditi yang sama di setiap daerah, menghasilkan produktivitas yang berbeda-beda. Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan, dapat pula meningkatkan kinerja dan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka menurut analisis peneliti untuk meningkatkan peranan dan kinerja sub sektor perkebunan dapat dilakukan hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja sub sektor perkebunan dapat dilakukan perbaikan dan rehabilitasi terhadap lahan perkebunan, sehingga luas lahan perkebunan meningkat dan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDRB dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan.
2. Meningkatkan produktivitas perkebunan dengan cara mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan mutu hasil produksi perkebunan.

3. Memperbaiki kinerja sub sektor perkebunan dengan melibatkan petani pekebun, pemerintah, investor dan pihak lain yang berkepentingan.
4. Meningkatkan peranan Dinas Perkebunan di Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong berkembangnya sub sektor perkebunan yang berpotensi untuk dijadikan basis perekonomian daerah tersebut.
5. Mengoptimalkan potensi perkebunan yang ada di masing-masing daerah untuk meningkatkan produksi hasil perkebunan.

